

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan pemerintah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undang. Ada beberapa karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Apabila laporan keuangan memenuhi beberapa karakteristik tersebut sudah menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan.

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa instansi pemerintahan harus melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang sudah ditetapkan. Adanya evaluasi, pengembangan dan juga pengawasan secara berkelanjutan merupakan suatu keharusan agar tugas sebagaimana dimaksud terlaksana dengan maksimal. pengelolaan keuangan yang baik akan menghasilkan informasi yang berkualitas, melahirkan akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan juga efisiensi yang kesemuanya adalah alat ukur dari baik atau tidaknya keuangan pemerintah dikelola serta menjadi azas pengelolaan (Kemenku. 2011)

Salah satu yang menjadi perhatian khususnya untuk pemerintah khususnya di tingkat kabupaten adalah mengenai keuangan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP) berisi mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah serta sebagai salah satu persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat berbagai tolak ukur yang digunakan untuk menilai kualitas laporan keuangan yang penuh digunakan oleh pemerintah maupun entitas lain, tapi mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku, laporan keuangan dikatakan baik atau berkualitas jika laporan itu memenuhi berbagai karakteristik diantaranya adalah relevan, andal dan dapat dibandingkan serta dapat dengan mudah untuk dipahami oleh penggunanya (Yuliani, Dkk. 2010)

Sistem Akuntansi Pemerintah sebagai alat satu serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengkhtisan, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah berguna untuk menjaga laporan keuangan pemerintah tetap berkualitas dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Dasar pemikiran ini berasal dari fakta bahwa terdapat penyimpangan–penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaannya audit laporan keuangan pemerintah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKB, 2015).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Nurillah, 2014). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan (Husna, 2013)

Upaya dalam pencapaian sistem pengelolaan keuangan daerah diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang memadai. Sistem pengendalian intern adalah sistem pengendalian intern pemerintah telah mengeluarkan PP NO.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diharapkan mampu sebagai instrumen dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik membutuhkan suatu sistem yang dapat mewujudkan pelaksanaan efektifitas pengelolaan keuangan daerah tersebut yaitu Sistem Pengendalian Intern (SPI). Dimana sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Zalni, 2013)

Berdasarkan fakta di lapangan untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas seringkali ditemukan adanya berbagai kendala yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia yang kurang mumpuni. Selain itu juga disebabkan oleh

adanya pengendalian yang lemah dan pemanfaatan teknologi informasi yang rendah. Adanya Sumber Daya Manusia yang kompeten menjadi salah satu syarat penting yang harus dipenuhi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Pramudiarta, 2015).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang akan dibahas dalam penelitian ini, faktor yang pertama adalah sistem pengendalian intern. Tingkat kualitas suatu laporan keuangan pemerintah daerah dapat ditentukan oleh seberapa baik pengendalian intern dalam institusi pemerintah daerah itu sendiri. Jika pengendalian internal tersebut lemah atau rendah maka dalam mendeteksi adanya kecurangan dalam suatu proses penyusunan laporan keuangan akan sulit sehingga bukti audit yang diperoleh pemerintah daerah dari informasi/data akuntansi tidak akan kompeten. Sebuah sistem pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk menghapus semua peluang akan terjadinya kesalahan atau kecurangan, akan tetapi sebuah sistem pengendalian intern yang baik dapat menekan terjadinya sebuah kesalahan dan kecurangan dalam batas-batas yang dianggap layak, serta seandainya hal tersebut terjadi maka akan segera dapat diketahui dan diatasi. (Herawati, 2014)

Faktor kedua adalah kompetensi sumber daya manusia Menurut (Roviyantie, 2011) laporan keuangan merupakan sebuah produk yang seharusnya dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, kemampuan sumber daya manusia sangat diperlukan, tenaga kerja yang mempunyai kompetensi yang baik sangat mempengaruhi hasil laporan keuangan yang berkualitas, begitu juga dengan entitas pemerintah daerah. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya

Manusia (SDM) yang memahami dan berkompeten dalam akuntansi pemerintah keuangan daerah, bahkan organisasional tentang pemerintah.

Persoalan yang ada di Pemerintahan khususnya Pemerintah daerah bahwa rotasi jabatan yang dilakukan diseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah seringkali tidak didasarkan pada nilai-nilai kompetensi, kapasitas dan kapabilitas pegawai. Selain itu juga masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak memiliki sistem pengendalian intern yang baik serta tidak menguasai pemanfaatan teknologi yang maksimal sebagaimana yang telah dipesyaratkan oleh regulasi Badan Pegawai Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2015)

Hasil pemeriksaan BPK terkait dengan sistem pengendalian intern tersebut kemudian dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan dinyatakan dalam sebuah temuan kelemahan sistem pengendalian internal. Semakin lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Kelemahan sistem pengendalian intern tersebut terdiri atas lemahnya akuntansi laporan dan lemahnya struktur pengendalian (BPKP, 2015). Selain itu teknologi informasi memiliki peranan yang sangat signifikan dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan karena regulasi yang ada masyarakat bahwa seluruh aktifitas keuangan harus terkomputerisasi dan berbasis teknologi informasi. Manfaat yang didapatkan dengan penggunaan teknologi informasi ini diantaranya adalah bahwa informasi yang dihasilkan akan lebih akurat, efisiensi waktu dan tenaga jika dibandingkan dengan sistem manual. Inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk membuatkan payung hukum terhadap penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan yaitu melalui peraturan pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Meskipun demikian kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan pegawai pemerintah yang gagap teknologi sehingga menghambat penggunaanteknologi informasi secara maksimal (Komang, Dkk. 2014)

Permasalahan yang timbul dalam aspek sumber daya manusia, pengendalian intern dan pengawasan teknologi informasi ini memberikan pemahaman bahwa ketiga aspek tersebut saling berkaitan erat dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas di instansi pemerintah khususnya di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Roshanti, Dkk (2014) dalam penelitiannya menghasilkan kesimpulan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya Shylvia, Dkk (2016) dalam penelitiannya juga menghasilkan kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah Pacitan memiliki misi yang berkaitan langsung dengan reformasi birokrasi yang khususnya yang berkaitan dengan masalah pengelolaan keuangan yang dituangkan di dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi kepemimpinan daerah. Pemerintah Kabupaten Pacitan juga harus menjalankan regulasi yang salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kondisi ini memerlukan kajian yang mendalam agar dapat dilakukan penilaian terhadap kerja pemerintah dari ketiga aspek yang telah dijelaskan sebelumnya.

Salah satu pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang harus segera disikapi adalah minimnya angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di peringkat ke 29 dari 38 kabupaten/kota se jatim. Satu-satunya jalan menyikapi hal yang akan berdampak kurang baik untuk kota 1001 Goa ini adalah, meningkatkan rata-rata lama sekolah yang saat ini masih 7,6 tahun, sementara yang diharapkan 12,64 tahun. keberadaan Universitas Terbuka (UT) Malang di Kabupaten Pacitan selama ini cukup membantu pemerintah daerah tentang peningkatan Sumber Daya Manusia di Pacitan, namun demikian banyak masyarakat belum tahu keberadaan maupun eksistensi kampus negeri ke 45 yang diresmikan langsung Presiden Soeharto tersebut.

Komitmen UT Malang terhadap peningkatan SDM di Pacitan yang nyatanya mampu meluluskan 400 Sarjana dan Pascasarjana berkualitas ini patut untuk diapresiasi Pemda Pacitan, selebihnyamasyarakat semakin mempunyai banyak pilihan untuk melanjutkan jenjang pendidikan, tanpa perlu menyita waktu, tenaga maupun finansial. Berbagai masukan akan kebutuhan gedung sekretariat UT Malang di Pacitan secepatnya akan dikomunikasikan Gagarin kepada Bupati sebagai pengambilan keputusan, namun yang pasti pemerintah daerah membuka diri terhadap berbagai masukan yang mendorong SDM masyarakat Pacitan. <https://pacitankab.go.id/tag/sdm/DiskominfoPacitan>

Penelitian ini memiliki banyak perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dimana didalam penelitian ini lingkungan yang diteliti lebih spesifik lagi yaitu di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penggunaan istilah yang telah terbarukan oleh regulasi tentang SKPD juga menjadi salah satu perbedaan maendasar karena setiap perubahan kebijakan

selalu lebih komprehensif terhadap semua kebijakan yang ada di dalam suatu entitas khususnya yang berkaitan dengan masalah laporan keuangan. Penelitian ini penting untuk dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan karena sebagaimana di dalam penjabaran Visi Pemerintah juga telah menetapkan pengelolaan keuangan dan pemerintah juga telah menetapkan pengelolaan keuangan dan peningkatan pelaporan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan permasalahan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengambil judul: **Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pacitan.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan?
4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut untuk:

- a) Mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.
- b) Mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.
- c) Mengetahui Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.
- d) Mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat menambah dan literatur baru bagi mahasiswa di Universitas terutama Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Ponorogo.

2) Bagi SKPD Kabupaten Pacitan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai saran bagi seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Pacitan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

3) Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan baik secara teoritis maupun secara praktis, selain itu dapat menambah wawasan dan pengalaman serta menjadi sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama duduk di bangku kuliah dan membandingkan dengan keadaan di lapangan.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti dapat memberitambahkan pengetahuan bagi kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

